

Catatan Kritis
Potensi Kecurangan Dalam Pengadaan Gordyn DPR RI

Pengadaan gordyn yang dilakukan oleh DPR RI pada tahun anggaran 2022 berpotensi menimbulkan kecurangan. Besarnya alokasi anggaran untuk penggantian gordyn di rumah jabatan anggota DPR RI tidak menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan penelusuran ICW, setidaknya terdapat 4 (empat) temuan berkaitan dengan pengadaan gordyn dan blind yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. **Pertama, ketiadaan transparansi mengenai volume pekerjaan dalam proses perencanaan.** Seperti yang diketahui bersama, Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2022 merencanakan untuk mengganti gordyn di rumah jabatan DPR RI. Berdasarkan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) diketahui bahwa pagu anggaran yang dialokasikan sebesar [Rp48,75 miliar](#). Di dalam rincian pengadaan dengan judul “Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata” tidak terdapat informasi secara jelas mengenai volume pekerjaan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa terkait transparansi informasi.

Kedua, terdapat potensi kecurangan yang bentuknya mengarah pada pemenang tertentu. Sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam [LPSE DPR RI](#), waktu pembuatan tender dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022. Hingga saat ini prosesnya sedang berada pada tahap [evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga](#). Total penyedia yang mendaftar untuk lelang tersebut sebanyak 49 perusahaan, sedangkan penyedia yang telah memasukan penawaran hanya tiga perusahaan. Berikut informasi detailnya:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran
1	PT Sultan Sukses Mandiri	Rp37.794.795.705
2	PT Panderman Jaya	Rp42.149.350.236
3	PT Bertiga Mitra Solusi	Rp43.577.559.594

Tabel 1. Peserta Pengadaan Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata

Dalam proses pemilihan penyedia, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh ketiga penyedia tersebut, yaitu izin usaha dalam bidang dekorasi interior. Berdasarkan informasi di dalam [Sistem Informasi Kinerja Penyedia \(SIKaP\)](#) milik LKPP diketahui bahwa dari tiga perusahaan tersebut, yang memegang izin usaha untuk dekorasi interior hanya PT Bertiga Mitra Solusi. Sedangkan dua perusahaan lainnya sama sekali tidak memiliki izin usaha tersebut. Hal ini patut diduga bahwa proses pengadaan tersebut hanya bersifat formalitas saja karena tidak ada kompetisi antar para penyedia.

Ketiga, terdapat pengadaan yang diduga hampir serupa pada tahun 2016. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam LPSE DPR RI diketahui bahwa pada tahun 2016 telah ada paket pengadaan dengan nama “Pemasangan Horizontal Blind Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Tahun Anggaran 2016” dengan nilai kontrak sebesar Rp1,04 miliar. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, yang menyatakan bahwa tidak pernah ada pergantian gordyn dan blind sejak tahun 2009.

Selain itu, sejak tahun 2015 hingga 2016 diketahui bahwa terdapat enam paket pengadaan barang terkait kelengkapan sarana rumah jabatan anggota DPR RI di Kalibata dengan nilai kontrak sebesar Rp 33 miliar. Namun sayangnya tidak ada informasi detail mengenai barang yang dibeli pada tahun tersebut. Berikut informasi detailnya:

No	Nama Paket	Tahun	Anggaran
1	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Tamu Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Tahun Anggaran 2016 spse 3	2016	3.699.630.000
2	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Makan Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Tahun Anggaran 2016 spse 3	2016	7.703.764.547
3	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Kerja Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Tahun Anggaran 2016 spse 3 Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Kerja Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Tahun Anggaran 2016 spse 3	2016	4.155.251.100
4	Pemasangan Horizontal Blind Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Tahun Anggaran 2016 Tender Ulang spse 3	2016	1.042.367.000
5	Pengadaan Kelengkapan Sarana Ruang Keluarga Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Tahun Anggaran 2016 spse 3	2016	7.499.250.000
6	Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata spse 3	2015	9.176.691.500

Tabel 2. Daftar Pengadaan Barang untuk Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata

Keempat, harga barang yang dibeli terindikasi tidak sesuai standar karena terlampu mahal. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, diketahui bahwa anggaran pembelian gordyn dan blind senilai Rp48,7 miliar diperuntukan bagi 505 rumah jabatan anggota DPR RI. Artinya, setiap rumah menelan biaya sekitar Rp96 juta. Hal ini tentu tidak masuk akal. ICW mencoba menghitung biaya yang dikeluarkan untuk pembelian gordyn dan blind dengan asumsi terdapat 10 titik pemasangan¹ pada satu rumah. Berikut hasilnya:

No	Keterangan	Titik Pemasangan	Harga per unit	Jumlah Rumah	Total
1	Gordyn	10	Rp2.000.000	505	Rp10.100.000.000
2	Blind	10	Rp2.000.000	505	Rp10.100.000.000
TOTAL					Rp20.200.000.000

Jika harga masing-masing gordyn dan blind paling mahal adalah Rp2 juta, maka setiap satu rumah membutuhkan biaya sebesar Rp20 juta. Perhitungan ini menggunakan harga yang paling tinggi sehingga ada kesempatan bagi Sekretariat Jenderal DPR untuk menghemat anggaran, apalagi saat masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

¹ Lampiran foto

Dari hasil temuan tersebut, ICW mendesak agar:

1. Sekretariat Jenderal DPR RI harus membuka dokumen pengadaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Sekretariat Jenderal DPR RI harus menghentikan sementara proses pengadaan penggantian gordyn dan blind untuk memberikan kesempatan bagi penyedia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang disyaratkan.

Indonesia Corruption Watch
29 Maret 2022

Narahubung
085770623302
085759317121





Google